

POTENSI DAN PETA KONFLIK PADA PILKADA ACEH TAHUN 2017

Mumtazinur
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
mumtazinur@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This article is an effort to explain the potentiation of conflict and the correlation to the map of conflict. It begins by a brief several cases of violence or riots that occurred before the election. this paper also describes the forms of violence that occurred during regional elections in Aceh. besides, this paper also tries to provide a solution to the conditions that occur or as a preventative measure for similar cases in the future

Keywords : Election, Conflict, Violence, riots

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan upaya untuk menjelaskan potensi konflik dan kaitannya dengan peta konflik. Dimulai dari sekilas beberapa kasus kekerasan atau kerusuhan yang terjadi menjelang pemilu. Makalah ini juga memaparkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Aceh. Selain itu, tulisan ini juga mencoba memberikan solusi atas kondisi yang terjadi atau sebagai langkah preventif untuk kasus serupa di kemudian hari

Kata Kunci: Pemilu, Konflik, Kekerasan, Kerusuhan

Pendahuluan

15 Februari 2017 yang lalu menjadi hari yang penting bagi masyarakat Indonesia yang kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan ini berlangsung di 101 daerah, 7 Provinsi dan 94 Kabupaten/kota di Indonesia. Pemilihan ini merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia sebagai bentuk perayaan Demokrasi yang merupakan bagian dari hak konstitusional sebagai warga negara.

Pilkada sebagai bagian dari proses demokratisasi bangsa Indonesia sekaligus menjadi ajang bagi rekrutmen politik yaitu rakyat menyeleksi tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik sebagai Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil bupati, atau sebagai walikota/wakil walikota. Kepala daerah yang nantinya terpilih akan mengemban

jabatan politik yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintah sebagai bagian dari perjalanan demokrasi bangsa Indonesia.

Selain itu pilkada juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan sendiri kepala daerah yang diharapkan dapat membawa perubahan. Tidak hanya itu pemilihan ini sekaligus menjadi ajang pembelajaran politik bagi masyarakat pada umumnya dan terutama bagi pemuda atau pemilih pemula. Menumbuhkan antusiasme dan kepedulian masyarakat menjadi salah satu hal yang diharapkan dari adanya pesta demokrasi ini.

Momentum perayaan pilkada pada satu sisi menunjukkan bentuk antusiasme masyarakat, persiapan pemilihan oleh panitia, persiapan dari para pasangan calon, keriuhan dan kemeriahan kampanye dan baliho-baliho dan lain sebagainya. Namun, pada sisi yang lain pemilihan ini juga berpotensi atau rawan konflik yang ditengarai dapat mengganggu stabilitas keamanan selama pilkada berlangsung.

Potensi kekerasan dan konflik merupakan ancaman yang dapat dan sangat mungkin terjadi dalam konteks interaksi sosial bermasyarakat. Kehidupan sehari-hari masyarakat pun tidak terlepas dari potensi konflik maupun kekerasan yang terjadi dengan berbagai latar belakang dan faktor pemicu. Nuansa pilkada yang berlangsung pun tak terhindar dari potensi rawan kekerasan maupun konflik, mengingat pemilu didasari oleh ; persaingan antar pasangan calon serta berbagai faktor lain dapat mendasari timbulnya konflik selama proses pemilihan.

Pada pilkada 2017 ini potensi terjadinya konflik cenderung tinggi. Hasil survey Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di sejumlah wilayah menunjukkan potensi konflik yang cukup memungkinkan terjadi terutama di tiga provinsi yang cukup menjadi sorotan yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat.¹ Tak mengherankan mengingat ketiga daerah tersebut notabene merupakan daerah yang mempunyai sejarah panjang terlibat konflik.

Provinsi Aceh menjadi daerah yang paling banyak menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada tahun ini. Dari 101 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan

¹ Dheri Agriesta dalam “Potensi Kekerasan dan Konflik Pilkada Cenderung Tinggi “melalui www.metrotv.com diakses pada tanggal 22 Maret 2017.

pilkada, 21 daerah berada di provinsi Aceh. Pagelaran ini akan menjadi yang terbesar dengan memilih 1 gubernur, 20 bupati dan walikota. 21 daerah dengan rincian satu provinsi akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 16 kabupaten menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati, sementara 4 kota akan melangsungkan pemilihan walikota dan wakil walikota.²

Lebih lanjut disebutkan bahwa di Aceh setidaknya ada empat kabupaten yang dianggap rawan konflik oleh Bawaslu yaitu Aceh Pidie, Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Timur. Jenis pelanggaran dan kekerasan yang muncul hingga saat ini dan dapat mengarah pada potensi konflik pun beragam. Kekerasan yang terjadi berupa Pembakaran alat peraga, perusakan posko salah satu paslon (pasangan calon), penyerangan mobil tim sukses paslon, hingga pemukulan salah satu paslon.

Ada beberapa fakta yang menarik terkait dengan Aceh sebagai daerah pemilihan terutama Aceh Utara yang menjadi studi kasus untuk penelitian ini. Pertama, Aceh Utara merupakan salah satu daerah yang masuk kategori rawan konflik sebagaimana yang disebutkan oleh Bawaslu. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Aceh Utara masuk sebagai salah satu daerah paling miskin di Aceh diikuti oleh Aceh Timur, Bireuen, dan Sigli.³

Fakta-fakta tersebut diatas dapat memperkuat latar belakang mengapa daerah-daerah tersebut rawan atau berpotensi konflik pada proses penyelenggaraan pilkada. Lebih lanjut potensi konflik ini dapat dilihat dari pendekatan kesejahteraan untuk menjelaskan keterkaitan antara aspek ekonomi dan potensi kerawanan konflik.

Faktor minimnya kesejahteraan atau tingkat ekonomi masyarakat disinyalir dapat menjadi pemicu timbulnya konflik terutama dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat miskin dalam konsep ini dianggap sebagai yang mudah diprovokasi. Mereka akan mudah diprovokasi dikarenakan kondisi ekonomi yang mendesak sehingga mereka rela melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan pribadi.

² Data KPU dalam “*Daerah di Aceh terbanyak ikut Pilkada Serentak 2017*” melalui www.m.viva.co.id diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

³ Irwan Saputra dalam “*Aceh Utara Daerah Paling Rawan Konflik dan Kecurangan Pilkada*” melalui www.modusaceh.co diakses pada tanggal 24 Maret 2017.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada penyelenggaraan pesta demokrasi kerap kali diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran seperti intimidasi maupun *money politic*. Praktik-praktik curang tersebut kerap menargetkan masyarakat miskin sebagai sasaran karena dianggap akan lebih mudah untuk diintimidasi. Apalagi jika memberikan uang sebagai bentuk balas budi yang notabene menjadi hal yang penting bagi masyarakat tersebut.

Tidak hanya itu, bentuk kekerasan juga sangat memungkinkan terjadi selama penyelenggaraan pilkada seperti yang terjadi di beberapa daerah di Aceh terutama di Aceh Utara yang berupa kekerasan psikis. Kekerasan yang terjadi selama kampanye cenderung meningkat dengan persentase 49% kasus kekerasan terjadi di masa persiapan, dan 51% kasus terjadi selama masa kampanye.⁴

Beberapa kasus kekerasan yang terjadi yaitu pertengkaran antara anggota timses paslon Bupati Fakhurrazi-Mukhtar Daud dengan anggota timses paslon paslon Partai Aceh yang terjadi pada 24 Oktober lalu. Pertengkaran dilatarbelakangi oleh pengibaran bendera Partai Aceh di desa tersebut yang berujung pada bentrokan.

Kasus Joni pada Desember lalu juga menyita perhatian masyarakat terkait dengan kasus pemukulan Di Leubok Mane, Aceh Utara yang melibatkan simpatisan salah satu paslon dengan simpatisan lainnya. Kasus ini kemudian berlanjut pada dengan penyerangan terhadap rumah Joni di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.

Beberapa kasus kekerasan lain yang pernah terjadi sepanjang 2017 seperti Penembakan posko calon Bupati (Ridwan Abubakar) di Aceh Timur oleh OTK pada tanggal 24 Agustus 2016, Pengeroyokan Ketua PPS Aceh Timur oleh tim sukses bakal calon Bupati Aceh Timur, Serta pemukulan anggota KIP Bener Meriah oleh Ketua KIP Bener Meriah tanggal 7 September 2016.⁵

Adanya kasus-kasus tersebut menunjukkan Aceh merupakan daerah yang sangat dinamis bahkan cenderung sangat konfliktual pada proses penyelenggaraan pilkada 2017

⁴ “Kekerasan Selama Proses Pilkada 2017, Terbanyak di Aceh “ dalam www.bbc.com diakses tanggal 24 Maret 2017.

⁵ Sarah Nuraini Siregar dalam “Masalah Keamanan Pilkada Aceh 2017 : Pengalaman dan Pembelajaran Pilkada Aceh 2006 dan 2012” melalui www.politik.lipi.go.id diakses tanggal 24 Maret 2017.

lalu. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat penetapan paslon terpilih pasca putusan MK belum diputuskan, sehingga potensi atau ancaman konflik masih mungkin terjadi. Hal ini menjadi mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peta konflik di Aceh pada pilkada 2017.

Penyelenggaraan Pilkada dan Potensi konflik di Aceh

Membahas mengenai proses penyelenggaraan pilkada dan keterkaitannya dengan konflik pilkada, maka Aceh pada umumnya dan Aceh Utara pada khususnya sangat berpotensi sebagai daerah rawan terjadinya konflik selama pilkada berlangsung. Kondisi tersebut bukanlah tanpa alasan mengingat notabene Aceh merupakan daerah di Indonesia yang mempunyai catatan panjang konflik berkepanjangan.

Aceh merupakan sebuah wilayah yang terletak di ujung paling utara pulau Sumatera. Sepanjang sejarah perjalanannya, Aceh tidak pernah terlepas dari konflik. Dimulai dari zaman penjajahan Belanda yang telah memaksa masyarakat Aceh mengangkat senjata untuk mengusir para kolonial. Selanjutnya, konflik gelombang pertama ditandai dengan terjadinya gejolak pada tahun 1953 dibawah pimpinan Teungku Daud Beureueh. Lalu, pada tahun 1976 terjadi gelombang gejolak kedua yang dipimpin oleh Hasan Ditiro yang memberi komando dari Swedia.

Gerakan pertama yang dipimpin oleh Daud Beureueh ini menuntut adanya otonomi daerah agar diberi status khusus sebagai wilayah yang berlaku syariat Islam yang tak juga diakomodir oleh pemerintah di Jakarta. Maka pada pergerakan yang kedua, ada tiga perbedaan fundamental dari gelombang pergerakan pertama. *Pertama*, gerakan ini tidak dipimpin oleh ulama. *Kedua*, isu negara Islam menjadi tidak dominan. *Ketiga*, melihat kemerdekaan dari Indonesia lebih penting daripada Islamisasi di Indonesia. Etnisitas Aceh dipandang lebih signifikan.⁶

Gerakan kedua tersebut semakin berkembang sejak terbentuk pada tahun 1976 dan sekarang ini dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik Aceh antara GAM dan Pemerintah RI sendiri telah berlangsung dalam kurun waktu 30 tahun. Selama kurun

⁶ John Braithwaite, 2010. *Anomie and Violence : Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding*. Canberra : The Australian National University Press. Hal. 353.

waktu tersebut, banyak dari masyarakat sipil maupun dari TNI yang telah menjadi korban. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dari segi materiil, fisik, tetapi juga kondisi psikis bagi masyarakat Aceh selaku korban konflik. Berbagai upaya resolusi konflik pun dilakukan oleh kedua pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik yang telah berlarut-larut tersebut.

Tantangan terbesar yang dihadapi Aceh paska perjanjian damai tahun 2005 yaitu bagaimana mempertahankan dan menjaga perdamaian yang telah diraih agar tetap terbina dan berlangsung lama (*long-lasting peace*). Tahapan ini membutuhkan kerjasama dari semua elemen terutama masyarakat sebagai komunitas terbesar agar proses *Peacebuilding* dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan semua pihak.⁷

Uraian singkat diatas sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana kondisi Aceh yang senantiasa berada dalam suasana yang cukup konflikktual. Beberapa pendapat masyarakat bahkan beranggapan kondisi inilah yang kemudian mempertegas mengapa Aceh selalu menjadi daerah yang rawan konflik tak terlepas juga dari potensi rawan konflik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sekalipun.

Sedikit menguraikan mengenai konflik, maka konflik menurut Daniel Webster dapat diartikan sebagai Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang cocok satu sama lain.⁸ Konflik politik merupakan salah satu jenis konflik yang sering terjadi. Konflik politik dapat diartikan sebagai konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlahnya terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan atau ideologinya.⁹

Berbicara mengenai Aceh dalam konteks potensi Konflik dalam penyelenggaraan pilkada, maka BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) telah melakukan pemetaan dengan membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terhadap 101 daerah yang akan menggelar pilkada pada 15 Februari 2017. Tiga dimensi yang diukur dalam IKP adalah penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Hasilnya ada tingkat kerawanan tinggi,

⁷ Mumtazinur, 2011. *Kesenian Aceh dan Rekonsiliasi Paska Konflik*. Universitas Gadjah Mada (Tesis)

⁸ Peg Pickering, *How to Manage Conflict*, Jakarta : Erlangga, 2000.

⁹ Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, aplikasi, dan penelitian*, Jakarta : Salemba Humanika, hal.67.

sedang, rendah. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di antaranya Papua Barat, Aceh, dan Banten. Selain tiga wilayah tersebut, yang lain dikategorikan rawan sedang dan rendah.¹⁰

Tabel 1. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

No	PROPINSI	TOTAL IKP	Dimensi Penyelenggaraan	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
	Peringkat IKP	Bobot AHP	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata
	Tertinggi - Terendah	Range 0-5	Range 0-5	Range 0-5	Range 0-5
1	Papua Barat	3,381	3,378	2,917	2,667
2	Provinsi Aceh	3,327	3,267	3,125	3,000
3	Banten	3,147	3,133	3,708	2,433
4	Provinsi Sulawesi Barat	2,367	2,556	2,083	2,233
5	DKI Jakarta	2,297	1,822	2,958	1,500
6	Provinsi Kep. Bangka Belitung	2,293	1,956	2,625	1,900
7	Gorontalo	2,015	1,556	2,083	2,067

Sumber : Data Bawaslu dalam www.ksp.go.id

Aceh memiliki tingkat kerawanan dari segi penyelenggara dan kontestasi. Penyelenggaraan berkaitan dengan integritas penyelenggara, profesionalitas, dan kekerasan terhadap penyelenggara. Sementara kontestasi berhubungan dengan pencalonan, kampanye, dan kontestan. Selain itu disebutkan pula bahwa potensi kerawanan dalam partisipasi atau keterlibatan warga juga mungkin terjadi. Hal ini juga dipertegas oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menambahkan bahwa tiga hal yang juga perlu mendapat perhatian agar bisa meminimalisasi konflik, yaitu penyelenggara yang tidak profesional, tidak independen, dan tidak tegas. Kemudian mobilisasi yang dilakukan elite politik lokal dan potensi konflik yang bersumber pada regulasi yang multitafsir.¹²

Bentuk-Bentuk Konflik Pada Penyelenggaraan Pilkada di Aceh Utara Tahun 2017

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Konflik dapat diartikan sebagai suatu benturan atau pertentangan yang terjadi karena beberapa faktor penyebab seperti ekonomi, perbedaan atau keberagaman, kelangkaan terhadap sumber daya, dan lain sebagainya. Dunia politik pun tak ayal dapat menjadi salah satu penyebab konflik dilingkungan sosial baik vertikal maupun horizontal. Konflik politik diartikan sebagai konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya konflik yang melibatkan pendukung antar partai politik atau simpatisan.

Konflik politik yang terjadi selama pelaksanaan pilkada di Aceh Utara tahun 2017 tercatat terjadi secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan fisik dapat berupa kekerasan, penyerangan, atau bahkan pengrusakan posko maupun alat peraga. Sedangkan kekerasan non-fisik atau verbal dapat berupa ancaman atau intimidasi terhadap masing-masing kelompok.

A. Agresi Verbal atau Konflik Non-Fisik

Ancaman dan Intimidasi

Konflik verbal atau konflik non-fisik juga ikut mewarnai selama proses pilkada. Salah satu bentuk konflik yang terjadi yaitu konflik verbal dalam bentuk ancaman dan intimidasi. Seperti yang terjadi pada 8 September 2016, di Desa. Alue Ie mameh Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya diduga telah terjadi pengancaman yang oleh 4 orang anggota KPA dari Kab. Aceh Utara dan Kab. Pidie Jaya terhadap seorang anggota Timses Cabup Kab. Nagan raya yang juga bekas anggota KPA Nagan Raya. Pengancaman terjadi karena anggota timses tersebut dianggap berkhianat dan tidak lagi mendukung lagi Cabup yang diusung PA dan KPA di Pilkada mendatang. Kasus serupa juga terjadi pada tanggal 22 Oktober 2016, di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, terjadi dugaan intimidasi yang dilakukan Timses pemenang balon Bupati Ramli. MS usungan Partai Aceh, kepada seorang warga yang mendukung balon Bupati HT. Alaidinsyah, yang diusung koalisi 8 partai politik di Aceh Barat. Dilaporkan sekitar 25 orang Timses balon PA memaksa mengganti spanduk pasbalon Alaidinsyah-H. Kamarudin dengan spanduk Pasbalon Ramli.MS-Bantah Puteh dan mengajak warga hanya mendukung pemenang Pasangan

baka calon Ramli.MS-Bantah dari PA saja.¹³ Meskipun konflik berupa ancaman dan intimidasi ini tidak terjadi secara langsung di wilayah Aceh Utara, namun diduga masih berkaitan satu sama lain karena berkaitan dengan salah satu partai yang merasa dibelot oleh mantan pendukungnya.

Pertengkaran

Salah satu bentuk konflik verbal yang terjadi selama penyelenggaraan pilkada di Aceh utara tahun 2017 tercatat dalam bentuk pertengkaran atau adu mulut antar para simpatisan masing-masing pasangan calon. Seperti yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2016 di Desa ceumpeudak Kecamatan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara terjadi pertengkaran antara anggota Timses Paslon bupati Fahrurazi – Muktar Daud, dengan anggota Timses paslon Partai Aceh (PA). Pertengkaran dilatarbelakangi tindakan pelarangan anggota Timses Paslon bupati Fahrurazi – Muktar Daud, terhadap anggota Timses PA yang mengibarkan bendera Partai Aceh di desa tersebut. Tetapi pertengkaran tidak berkembang menjadi bentrokan fisik, karena kesigapan aparat polsek setempat.¹⁴

B. Agresi Fisik atau Konflik Fisik

Beberapa fakta menunjukkan bahwa tingkat kekerasan selama pilkada di kawasan Aceh Utara jauh menurun dari intensitas dibandingkan dengan pilkada pada periode sebelumnya yang menunjukkan lebih banyak kasus kekerasan. Namun, kendatipun begitu masih ditemukan beberapa kasus kekerasan fisik seperti berikut ini:

Pemukulan

Pada tanggal 24 Desember 2016 terjadi kericuhan di Gampong leubok Mane, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Kericuhan ini melibatkan pasangan pendukung dari Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Kericuhan antar dua kubu itu bermula dari adu mulut antara simpatisan Partai Aceh dengan simpatisan PNA Pendukung Pasangan Fakhurazi dan Muktar Daud (FATAR), sehingga berujung pada pemukulan

¹³ Maya Dara Puspita” Maraknya Kasus Kekerasan di Aceh Jelang Pilkada 2017 dan Potensi Dampaknya” dalam <http://www.acehharini.com>, diakses tanggal 22 Oktober 2017

¹⁴ *Ibid*

terhadap dua simpatisan PNA. Pemukulan itu terjadi saat simpatisan PNA-FATAR sedang melakukan pembenahan Posko pemenangan Irwandi–Nova dan Fakhurrazi–Mukhtar tiba-tiba 2 oknum pendukung PA datang ke posko tersebut. Dan disitulah terjadi kericuan yang akhirnya terjadi pemukulan terhadap pendukung PNA-FATAR.¹⁵

Penyerangan

Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat yaitu kasus penyerangan rumah Joni di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Kasus penyerangan yang terjadi merupakan kelanjutan dari kekerasan pemukulan yang terjadi sebelumnya yang melibatkan pasangan pendukung dari Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Ribuan simpatisan Fachrurrazi H. Cut dan Mukhtar Daud (FATAR), Paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara nomor urut 4, mengepung rumah ketua tim pemenangan Partai Aceh (PA) M. Jhoni di Desa Matang Drien, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Pengepungan itu terjadi paska pemukulan terhadap Fadlon (35), merupakan timses Partai Nasional Aceh (PNA), yang dipukul oleh tim sukses Partai Aceh (PA). Penyerangan ini diduga sebagai bentuk balasan atas pemukan yang dilakukan kepada rekan mereka. Namun, kasus penyerangan ini tidak berlanjut dikarenakan tim Polres Aceh Utara langsung menuju lokasi dan mengamankan tiga orang pelaku.¹⁶

Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 menjadi momen penting bagi seluruh masyarakat Indonesia dan tak terkecuali bagi masyarakat Aceh yang juga turut melaksanakan pilkada. Momentum ini tak hanya menjadi bagian dari proses demokratisasi di Indonesia, namun sekaligus juga menjadi ajang untuk menentukan calon-calon pemimpin yang penting bagi masa depan bangsa.

Namun pilkada yang diidentikkan sebagai pesta rakyat tak serta merta berjalan lancar dan kondusif. Potensi konflik kerap muncul dalam proses penyelenggaraan pilkada di Indonesia terutama di Aceh. Dalam konteks ini, Aceh Utara menjadi salah satu kabupaten

¹⁵ “*penjelasan jubir pa soal pemukulan simpatisan pna*” dalam www.acehportal.com, diakses tanggal 22 Oktober 2017.

¹⁶ “*eks gam timses irwandi yusuf barisan fatar kepung rumah Jhoni*” dalam www.modusaceh.com, diakses tanggal 22 Oktober 2017

di Aceh yang dikategorikan sebagai daerah rawan konflik. Berkaca pada pelaksanaan pilkada periode sebelumnya, pelaksanaan pilkada di Aceh utara pun diwarnai sejumlah konflik yang melibatkan kandidat atau bahkan simpatisan dari masing-masing pasangan calon. Adapun konflik yang terjadi selama pelaksanaan pilkada ini dapat kita petakan kedalam faktor penyebab konflik, bentuk konflik yang terjadi, dan solusi yang dapat ditawarkan untuk pelaksanaan pilkada periode berikutnya.

Konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor perebutan kekuasaan, faktor rekaman konflik, faktor eksistensi, faktor regulasi, dan faktor rendahnya kesadaran berpolitik. Diantara faktor-faktor yang diuraikan tersebut faktor rekaman konflik menjadi yang paling penting mengingat pelaksanaan pilkada pada tahun 2012 sebelumnya sangat kompetitif dan konfliktual.

Sedangkan bentuk konflik yang terjadi dalam bentuk konflik fisik (non-verbal) serta konflik non-fisik (konflik verbal). Konflik fisik yang terjadi dalam bentuk penyerangan serta pemukulan yang melibatkan simpatisan masing-masing pasangan calon. Dibeberapa kabupaten lain pun konflik kekerasan fisik kerap terjadi terutama yang melibatkan pendukung paslon. Sedangkan konflik verbal terjadi dalam bentuk ancaman serta intimidasi.

Adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk penyelenggaraan pilkada periode berikutnya yaitu perlunya pembentukan dan penguatan regulasi atau undang-undang yang jelas dan tegas. Hal ini menjadi penting mengingat salah satu penyebab konflik dikarenakan kurang jelasnya regulasi yang berlaku dan saling tumpang tindih. Selain itu perlu diterapkan penghargaan dan juga hukuman bagi pihak-pihak yang ambil bagian dalam pilkada sebagai bagian dari bentuk persuasi untuk menciptakan pilkada yang kondusif. Penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) pun perlu diperkuat kembali mengingat banyak sekali unsur yang dilibatkan yang cukup signifikan bagi terciptanya pelaksanaan pilkada yang tertib dan aman. Penguatan partai politik secara akar rumput juga dapat menjadi solusi bagi terciptanya stabilitas politik dalam konteks bernegara dan berdemokrasi.

Saran-saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyaknya kekurangan dalam pembahasannya. Sehingga penulis mengharapkan adanya penyempurnaan dari peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti terkait dengan pilkada dan konflik. Bagi peneliti berikutnya dapat juga mengembangkan secara lebih terperinci apa yang belum dimuat dalam penelitian ini seperti faktor yang spesifik dalam konflik pilkada untuk kasus Aceh. Atau dapat juga memfokusnya pada bentuk solusi yang dapat ditawarkan untuk meminimalisir potensi konflik bagi daerah-daerah rawan konflik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Azwar, Saifuddin, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Bardan, Ibrahim, 2008, *Resolusi Konflik dalam Islam*, Banda Aceh : Aceh Institute
- Braithwaite, John, 2010. *Anomie and Violence : Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding*. Canberra : The Australian National University Press
- Galtung, Johan, 2007 , “*Peace by Peaceful Conflict Transformation-The Transcend Approach*” dalam *Handbook of Peace and Conflict Studies*,New York : Routledge.
- Nazir, Muhammad,1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghafia Indonesia
- Nivada, Aryos, 2015, *Rekam Jejak Pemilu 2014: Pengalaman dan Pembelajaran dari Aceh*, Banda Aceh : Dialeksis Publishing.
- Neuman, Sigmund, 1963, ”*Modern Political Parties* “, dalam *Comparative Politics : A Reader*, diedit oleh Harry Eckstein dan David E.Apter, London : The Free Press of Glencoe.
- Pickering, Peg , 2000, *How to Manage Conflict*, Jakarta : Erlangga.
- Sugiono, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :CV Alfabeta
- Supriyanto, Didik, 2013, *Menata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta : Yayasan Perluden.
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika
- Laswell, Harold D., dan Abraham Kaplan,1950, “*Power and society* “, New Haven : Yale University Press
- Lijphart, Arend, 1995. “*Electoral Systems and party Systems*”, Oxford : Oxford University Press
- Leedy, Paul D, 1997, *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey : Prentice Hall,inc,
- Periasamy, Amikavathi, 2000, *Integration as a form of curriculum reform :The teaching of environmental Education in KBSM Geography in a Malaysian Context*, Doctoral Thesis in University of Queensland
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, aplikasi, dan penelitian*, Jakarta : Salemba Humanika

- Fadjri Alihar, "Disparitas Regional dan Konflik Pilkada Aceh 2012" dalam ejournal.politik.lipi.go.id, diakses tanggal 10 Oktober 2017
- Gurr, Ted "Psychological Factors in Civil Violence", World Politics, Vol. 20, No.2, January 1968
- Prayudi " Perilaku Politik Kekerasan di Aceh Menjelang Pemilu ", dalam Jurnal INFO Vol. VI, No. 05/I/P3DI/Maret/2014, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
- , *Pilkada dan Antisipasi terhadap potensi konflik*, dalam Jurnal INFO Vol.VII,NO.21/I/P3DI/November/2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
- Refia Juniarti Hendrastin dan Budi Purwoko, *Studi Kasus Dinamika Psikologis Konflik Interpersonal siswa merujuk teori segitiga ABC Konflik Johan Galtung dan Kecenderungan penyelesaiannya pada siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK Mahardika Surabaya* , dalam Jurnal BK UNESA. Volume 04 Nomor 02 Tahun 2014
- Czyz , Magdalena Anna, 2006. *Applying the ABC Conflict Triangle to the Protection of Children's Human Rights and the Fulfillment of their Basic Needs: A Case Study Approach. Thesis.* (Online). (http://epu.ac.at/fileadmin/downloads/research_Cy.pdf). Diakses pada tanggal 12 September 2017
- Dheri Agriesta dalam "Potensi Kekerasan dan Konflik Pilkada Cenderung Tinggi " melalui www.metrotv.com diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- Donald Rothchild And Chandra Lekha Sriram, dalam "Conflict Prevention" melalui www.sais-jhu.edu, diakses tanggal 24 Maret 2017
- Heriyanto Hermansyah dalam "Kemesraan Sentra Gakkumdu " melalui www.kompasiana.com, diakses tanggal 04 Oktober 2017
- Irwan Saputra dalam "Aceh Utara Daerah Paling Rawan Konflik dan Kecurangan Pilkada" melalui www.modusaceh.co diakses pada tanggal 24 Maret 2017
- Johan Galtung dalam <http://id.scribd.com/doc/65634253/Teori-Konflik>, diakses pada 12 September 2017
- Maya Dara Puspita" Maraknya Kasus Kekerasan di Aceh Jelang Pilkada 2017 dan Potensi Dampaknya" dalam <http://www.acehharini.com>, diakses tanggal 22 Oktober 2017.
- Ridwan Hadi, "Lex Specialist'Pilkada Aceh", dalam www.aceh.tribunnews.com, diakses tanggal 09 Oktober 2017

- Sarah Nuraini Siregar dalam “*Masalah Keamanan Pilkada Aceh 2017 : Pengalaman dan Pembelajaran Pilkada Aceh 2006 dan 2012*” melalui www.politik.lipi.go.id diakses tanggal 24 Maret 2017.
- Teuku Rahmad Danil Cotseurani, “*Pilkada Aceh 2017; Politik dan Kepentingan Proyek*” dalam www.kompasiana.com, diakses tanggal 14 Oktober 2017
- Windy Siska,” *Regulasi Pilkada 2017 Lebih baik dari tahun 2015*”, dalam <http://sumeks.co.id>, diakses tanggal 04 November 2017
- Data KPU dalam “*Daerah di Aceh terbanyak ikut Pilkada Serentak 2017*” melalui www.m.viva.co.id diakses pada tanggal 23 Maret 2017
- “*Kekerasan Selama Proses Pilkada 2017, Terbanyak di Aceh* “ dalam www.bbc.com diakses tanggal 24 Maret 2017.
- “*Sentra Gakkumdu untuk Maksimalkan Sanksi Pidana Dalam Pilkada*” dalam www.jpn.com, diakses tanggal 04 Oktober 2017.
- “*Politik & Pilkada Aceh 2017: Suatu Rivalitas dan Integritas*” dalam Analisis Situasi Jaringan Survey Inisiatif, Edisi 13, Oktober 2016, Aceh: JSI
- “*Sekilas tentang sejarah pilkada di Indonesia dari zaman ke zaman* “, dalam www.cirebontrust.com, diakses pada 08 Oktober 2017.
- “*Menangkal potensi konflik Pilkada Serentak 2017* “ dalam www.ksp.go.id, diakses tanggal 09 Oktober 2017.
- Pilkada Aceh, Jaminan Keamanan Rendah,*” dalam www.waspada.com diakses tanggal 09 Oktober 2017
- “*Penjelasan Jubir PA Soal Pemukulan Simpatisan PNA*” dalam www.acehportal.com, diakses tanggal 22 Oktober 2017
- “*Eks GAM Timses Irwandi Yusuf Barisan FATAR Kepung Rumah Jhoni*” dalam www.modusaceh.com, diakses tanggal 22 Oktober 2017
- “*Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu/Pemilukada*”, dalam www.kompasiana.com, diakses tanggal 1 November 2017
- “*Peneliti: Gakkumdu di Aceh Jangan Terkesan 'Mandul'*”, dalam www.portalsatu.com, diakses tanggal 1 November 2017
- “*Catatan Diskusi Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal* “, dalam www.lipi.go.id, diakses tanggal 14 November 2017.

“*Kontroversi Payung Hukum Pilkada di Aceh* “, dalam www.tribunnews.com, diakses tanggal 15 November 2017

Tesis

Mumtazinur, 2011. *Kesenian Aceh dan Rekonsiliasi Paska Konflik*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Wawancara

Wawancara dengan M.Rizwan H.Ali Kepala Bidang Hukum dan Pengawasan KIP Aceh Utara tanggal 26 Agustus 2017 Bertempat di Kantor KIP Aceh Utara

Wawancara dengan AryosNivada, Peneliti Jaringan Survey Inisiatif pada tanggal 16 Agustus 2017 Pkl.14.00 WIB bertempat di Kantor JS di Lamdingan, Banda Aceh.

Wawancara dengan Kasubbag Pers Polres Aceh Utara pada tanggal 27 Agustus 2017 Pkl.14.00 WIB bertempat di Polres Aceh Utara di Lhoksukon